

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Amiruddin, H. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Arifin P. Soeria Atmadja. (2013). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, Dan Kritik. Edisi Ketiga*. P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bachar, D. (1987). *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*. Penerbit Pan Akademis Persin. Jakarta.
- Djafar, S. M. (2011). *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- hartini, R. (2017). *BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ibrahim, R., (1997), *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ilmar, A. (2012). *hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN. : Cetakan ke-1*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra aditya pBakri, Bandung.

- Nugroho, S. A. (2018). *hukum Kepailitan di Indonesia; Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya Cetakan ke-1*. Jakarta: PT. Prenadamedia Grup.
- Nurdin, A. (2012). *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT Alumn.
- Rachmadi, U. (2004). *Dimensi hukum kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rajagukguk., E. (2009). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan 1*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
- Riawan.W, T. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sanusi, A. (2017). *3 Pilar Utama Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Market Orientation, Good Corporate Governance and Professional Leadership)*. Jakarta Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Triguna.
- Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarso, V. S. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno, Z. A. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Mataram: Erlangga.

Teguh, H. P. (2019). *hukum Keuangan Negara*, Cetakan pertama. Bandung: CV Pustaka Setia.

Widjaja, G. (2004). *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yuhassarie, E. (2005). *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia, , Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: PusatPengkajian Hukum.

Jurnal

Khairandy Ridwan, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan : Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII, No.1 Vol.16 Januari 2009, hlm 11

Rahadiyan, Inda, “ Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam kaitannya dengan pemisahan keuangan Negara pada Permodalan BUMN”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum UII, Vol. 20, Nomor 4 Oktober 2013, hlm 625

Skripsi dan Tesis.

Arya Devendra Fatzgani.2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) Pada Badan Usaha Milik Negara*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Fahriza Nurul Safitri. 2012. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)*. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta.

Dolly Setiawan. 2017. *Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Persero Korelasinya Dengan Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Muhammad Teguh Pangestu, 2021, *Status Hukum Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara*, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nilasari, 2018, *Penentuan Boedel Pailit terhadap Tanah dan Bangunan yang telah diikat perjanjian pengkatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Developer Pilit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS- PAILIT/2013)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

